

---

**PEREMPUAN DAN AGENSI: ANALISIS FEMINISME  
POSKOLONIAL ATAS PEKERJA SEKS PEREMPUAN  
DI DANAU TEMPE**

Cindy Aulia Sari\*  
; [cindyauliasr@gmail.com](mailto:cindyauliasr@gmail.com)  
<sup>2</sup> Yedi Mulya Permana; [yedi@unud.ac.id](mailto:yedi@unud.ac.id)  
<sup>3</sup> Ni Nyoman Clara Listya Dewi; [claralistya@unud.ac.id](mailto:claralistya@unud.ac.id)  
\*corresponding author

## PEREMPUAN DAN AGENSI: ANALISIS FEMINISME POSKOLONIAL ATAS PEKERJA SEKS PEREMPUAN DI DANAU TEMPE

Informasi Artikel	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b> Sex work Agency Postcolonial Feminism Economic Survival</p>	<p><i>This research aims to explore how the sexualities of female sex workers (PSP) in the Danau Tempe area of Sanur, Bali, are constructed, negotiated, and utilized as strategies for survival in the unequal social and economic structures. Using a qualitative research design with purposive sampling, in-depth interviews were conducted with female sex workers in the Danau Tempe area who have been operating in the commercial sex industry for over ten years. The data were analyzed using descriptive qualitative analysis to interpret empirical findings within the social-cultural context. The study reveals that women's decisions to remain in sex work cannot be reduced to economic hardship alone, but it shows how structural pressure, economic marginalization, social exclusion, and the intertwining with personal agency are shaping their choices. Participants conceptualize sex work as a means of achieving economic autonomy and resisting dominant patriarchal norms. This research offers a postcolonial feminist perspective that challenges Western universalism about prostitution in the Global South countries and recognizes sex work as a form of labor embedded within broader power relations.</i></p>
	ABSTRAK
<p><b>Kata Kunci:</b> Pekerjaan Seks Agensi Feminisme Poskolonial Ketahanan Ekonomi</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana seksualitas Pekerja Seks Perempuan (PSP) di daerah Danau Tempe, Sanur, Bali, dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dimanfaatkan sebagai strategi bertahan hidup dalam struktur sosial dan ekonomi yang tidak setara. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pengambilan <i>purposive sampling</i>, wawancara mendalam dilakukan dengan PSP di daerah Danau Tempe yang telah beroperasi di industri seks komersial selama lebih dari sepuluh tahun. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk menafsirkan temuan empiris dalam konteks sosial-budaya. Studi ini mengungkapkan bahwa keputusan perempuan untuk tetap berada dalam pekerjaan seks tidak dapat direduksi hanya pada kesulitan ekonomi, tetapi menunjukkan bagaimana tekanan struktural, marginalisasi ekonomi, pengucilan sosial, dan keterkaitan dengan agensi pribadi membentuk pilihan mereka. Partisipan mengonseptualisasikan pekerjaan seks sebagai sarana untuk mencapai otonomi ekonomi dan melawan norma-norma patriarki yang dominan. Penelitian ini menawarkan perspektif Feminis poskolonial yang menantang universalisme Barat tentang prostitusi di negara-negara Dunia Selatan dan mengakui pekerjaan seks sebagai bentuk kerja yang tertanam dalam relasi kekuasaan yang lebih luas.</p>

## Introduction

Seks merupakan identitas dasar dari setiap manusia, tetapi proses pengekspresiannya tidak pernah lepas dari norma sosial dan budaya dari suatu golongan tertentu. Dalam pandangan Allen, seksualitas tidak hanya menjadi dorongan biologis untuk tujuan prokreasi, melainkan hasil dari relasi kuasa yang memproduksi dan mengontrol tubuh, hasrat, dan perilaku manusia (Allen, 2015). Namun, dalam praktiknya, pemenuhan kebutuhan seksual manusia seringkali dipenuhi dengan muatan moral dan politik, terutama ketika berkaitan dengan tubuh perempuan dalam budaya Timur. Perspektif budaya Timur mengenai ekspresi dari seksualitas manusia ini sering berbenturan dengan norma sosial, budaya, serta agama yang begitu kental (Capaldi, 2020).

Pemikiran terhadap seksualitas dalam budaya Timur berakar dari ideologi gender yang cenderung bersifat biner dan tumbuh lestari di masyarakat. Seksualitas, terutama bagi perempuan, kerap diposisikan sebagai isu yang tabu. Akibatnya, pengalaman serta ekspresi seksualitas perempuan direpresi oleh budaya dan norma yang tumbuh di masyarakat. Latuconsina memaparkan bahwa tubuh perempuan dikonstruksikan bukan sebagai ruang otonomi personal, melainkan sebagai simbol kehormatan keluarga, komunitas, bahkan negara (Latuconsina, 2025). Kontrol ini dimanifestasikan melalui berbagai mekanisme sosial, mulai dari norma berpakaian, pembatasan perilaku, hingga pelabelan moral terhadap ekspresi seksual yang berlebihan. Tubuh perempuan dijadikan sebagai “teks sosial” tempat ideologi dan kekuasaan bekerja untuk mendisiplinkan seksualitasnya agar sesuai dengan citra perempuan ideal versi masyarakat (Neville-Sheppard, 2019).

Selain sebagai konstruksi sosial, seksualitas juga menjadi arena politik yang merefleksikan relasi kuasa antara negara, masyarakat, dan individu (Richardson, 2016). Dalam konteks budaya Timur, pengaturan terhadap seksualitas perempuan tidak hanya dilakukan melalui norma sosial dan agama, tetapi juga melalui kebijakan negara, wacana moral publik, serta praktik-praktik sosial yang bersifat eksklusif dan diskriminatif. Tubuh perempuan sering menjadi objek yang merepresentasikan nilai-nilai kehormatan, moralitas, dan identitas nasional. Hal ini menyebabkan pengalaman personal perempuan atas tubuh dan seksualitasnya kerap dikesampingkan (Latuconsina, 2025). Dalam situasi tersebut, perempuan yang berada di luar norma seksual dominan, termasuk pekerja seks, mengalami

marginalisasi berlapis. Marginalisasi ini terjadi di berbagai arena, termasuk di dalamnya ekonomi, sosial, politik, serta budaya.

Pandangan normatif terhadap seksualitas dan kontrol terhadap tubuh perempuan tentu tidak lahir secara tiba-tiba. Sejak masa kolonial, tubuh perempuan, utamanya perempuan Timur, menjadi objek representasi eksotis yang dikonstruksikan oleh pandangan kolonial Barat. Perempuan Timur digambarkan sebagai makhluk sensual, pasif, dan tunduk, yang menegaskan superioritas moral dan rasial bangsa penjajah atas bangsa yang dijajah (Park, 2022). Sementara itu, perempuan Barat diasosiasikan dengan kemajuan, kesucian, dan moralitas. Hierarki simbolik inilah yang kemudian diwariskan dan diinternalisasi dalam budaya Timur yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap tubuh dan seksualitas perempuan. Sebagaimana disampaikan oleh Hartoyo selaku anggota KAPAL Perempuan (Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif) dalam wawancara mendalam (17 Desember 2025), warisan pandangan kolonial ini menempatkan perempuan dalam sistem dominasi marginalisasi ganda. Perempuan Timur tidak hanya termarginalkan karena budaya patriarki lokal, tetapi juga warisan kolonial yang menempatkan mereka pada posisi “*others*” atau diposisikan sebagai kaum yang termarginalkan (Park, 2022).

Dalam konteks sosial-ekonomi, posisi marjinal perempuan Timur diperkuat oleh struktur kapitalisme global yang masih berakar pada warisan kolonial. Perempuan kelas bawah dalam negara poskolonial menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial. Sebagai reaksi atas tekanan multidimensional ini, tubuh perempuan dipandang sebagai satu-satunya modal yang dapat ditransaksikan sebagai alat bertahan hidup di tengah ketimpangan ekonomi (Lee, 2024). Namun, perspektif semacam ini cenderung mengabaikan konteks historis dan kultural yang membentuk posisi perempuan di masyarakat poskolonial. Akibatnya, perempuan pekerja seks di Timur sering digambarkan sebagai korban pasif yang tidak memiliki agensi dan kontrol terhadap kehidupannya maupun tubuhnya. Mereka dipandang sebagai korban yang terikat oleh tradisi, terbelenggu oleh budaya patriarki, memiliki tingkat literasi rendah, dan memiliki perekonomian buruk (Kapur, 2001). Padahal nyatanya, bagi sebagian perempuan di Timur, menjual jasa seksual bukan hanya menjadi bentuk keterpaksaan ekonomi, melainkan strategi untuk mempertahankan kendali atas tubuh dan hidupnya di tengah keterbatasan pilihan.

Pergerakan Feminisme yang lahir di Barat kerap berfokus pada viktimisasi perempuan dan perjuangan untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Meskipun isu ini

begitu penting, tetapi pergerakan di Barat kerap kali mengabaikan konteks yang hadir di negara poskolonial, sehingga perjuangan yang dibawanya sering kali menguniversalkan pengalaman perempuan di seluruh dunia. Bagi Feminisme Barat, *voluntary prostitution*, atau kegiatan prostitusi secara sukarela di Timur digeneralisasi sebagai pengalaman perempuan sebagai korban yang pasif dan harus dibantu oleh feminis Barat, bukan sebagai subjek dengan agensi (Sultana, 2015). Konstruksi ini cenderung mengesampingkan argumen bahwa perempuan di negara poskolonial juga memiliki agensi terhadap seksualitasnya sendiri.

Kritik terhadap bias universal Feminisme Barat inilah yang melahirkan pendekatan Feminisme poskolonial sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Pengalaman perempuan di negara-negara poskolonial tidak dapat dipahami hanya melalui kacamata Feminisme arus utama yang didasarkan pada pengalaman perempuan Barat, tetapi juga perlu dilihat melalui relasi kekuasaan yang bersinggungan antara kolonialisme, patriarki, dan kapitalisme global (Suryawati et al., 2021). Dalam konteks ini, tubuh perempuan pekerja seks di negara-negara poskolonial menjadi arena di mana berbagai kekuatan sosial, ekonomi, dan politik bertemu. Berdasarkan kritik ini, pendekatan Feminisme poskolonial menjadi penting untuk memahami pengalaman perempuan di Dunia Selatan yang memiliki interseksionalitas dengan konteks lokal. Tidak hanya sebagai korban, perempuan di Dunia Selatan juga menjadi subjek yang berupaya menegosiasikan ruang otonominya di tengah sistem yang menindas.

Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai upaya PSP di Danau Tempe, Kecamatan Sanur, Bali menegosiasikan pilihan, identitas, dan agensi mereka di tengah keterbatasan yang membentuk hidup mereka. Kebaruan ilmiah yang penulis tawarkan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif Feminisme poskolonial dalam menganalisis konstruksi seksualitas perempuan pekerja seks dengan cakupan wilayah Danau Tempe, Kecamatan Sanur, Bali. Penelitian ini sekaligus menjadi kritik terhadap universalisme Feminisme Barat yang sering gagal membaca kompleksitas pengalaman perempuan di negara poskolonial. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang kerap berfokus pada aspek ekonomi dan moralitas, artikel ini berupaya memadukan analisis teoritis dengan hasil wawancara langsung terhadap beberapa pekerja seks di Danau Tempe untuk melihat persepsi mereka memahami tubuh, seksualitas, dan agensinya. Penelitian ini berupaya menjawab faktor bertahannya seorang perempuan yang menjadi PSP dalam jangka waktu yang panjang dan cara mereka memaknai pilihan tersebut dalam perspektif Feminisme poskolonial.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang berupaya memahami fenomena sosial dari perspektif subjek yang diteliti secara mendalam dan kontekstual. Penelitian kualitatif tidak berfokus pada generalisasi data, melainkan pada upaya memahami makna, pengalaman, dan konstruksi sosial yang melingkupi subjek penelitian (Lim, 2025). Pendekatan ini dipilih oleh penulis karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berupaya menggali cara PSP di Bali memaknai tubuh, seksualitas, dan agensinya dalam konteks sosial-budaya poskolonial. Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yakni teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Kriteria narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah perempuan biologis yang bekerja sebagai PSP di kawasan Danau Tempe, Kecamatan Sanur, Bali sebagai perantau, dan telah bekerja selama lebih dari sepuluh tahun sebanyak dua orang. Penentuan lokasi ini dipilih karena kawasan Danau Tempe yang dikenal sebagai salah satu lokasi utama pekerja seks di wilayah Denpasar yang merepresentasikan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks dari industri seks komersial di Bali.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yakni studi literatur dan *in-depth interview*. Studi literatur dilakukan terhadap karya-karya ilmiah dan teori yang relevan dengan seksualitas, Feminisme poskolonial, dan ideologi gender. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap dua orang PSP agar peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan interpretasi subjek penelitian secara lebih terbuka dan reflektif. Analisis dilakukan menggunakan analisis deskriptif, yaitu proses pengolahan data dengan cara menafsirkan temuan empiris berdasarkan konteks sosial dan teoritis yang melingkupinya (Furidha, 2023). Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan makna dan relasi kuasa yang muncul dari narasi para narasumber tanpa mereduksi atau menggeneralisasi pengalamannya. Dalam proses analisis, peneliti mengaitkan hasil wawancara dengan kerangka teori Feminisme poskolonial untuk melihat korelasi pengalaman PSP dalam mencerminkan interaksi antara warisan kolonial, struktur patriarki, dan ketimpangan ekonomi.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai komodifikasi tubuh perempuan di Indonesia, sebagian besar menyoroti isu moralitas, kesehatan reproduksi, dan kemiskinan. Namun, meskipun penting, pandangan ini sering kali mereduksi pengalaman sebagai pekerja seksual semata sebagai bentuk eksploitasi ekonomi terhadap perempuan Dunia Selatan. Sebagai kritik terhadap Feminisme Barat yang bersifat universalistik dan eurosentrik, Feminisme poskolonial menyoroti pengalaman perempuan di negara poskolonial yang sering kali disederhanakan, disamakan, bahkan dihapus dalam narasi Feminis arus utama. Perempuan Dunia Selatan kerap tidak memiliki ruang untuk berbicara karena suaranya selalu digantikan oleh kekuasaan kolonial dan patriarki (Suryawati et al., 2021). Dengan kata lain, perempuan Dunia Selatan menjadi subjek yang dibungkam dua kali, oleh sistem kolonial dan oleh Feminisme Barat itu sendiri. Kritik tersebut diperkuat oleh Mohanty yang menyoroti kecenderungan feminis Barat yang merepresentasikan rata-rata perempuan Dunia Selatan sebagai kaum yang tidak berpendidikan, miskin, terbatas, domestik, dan selalu menjadi korban. Hal ini kontras dengan perempuan Barat yang mempresentasikan dirinya sebagai kaum yang berpendidikan, modern, memiliki otoritas, dan kebebasan terhadap keputusannya sendiri. Mohanty mengkritik feminis Barat yang menggambarkan perempuan Dunia Selatan sebagai kaum yang harus diselamatkan oleh perempuan Barat, dengan menawarkan pemikiran bahwa pengalaman perempuan Dunia Selatan perlu dipahami secara kontekstual, bukan melalui lensa universal Feminisme Barat yang mengabaikan perbedaan kelas, ras, agama, dan aspek historis negara poskolonial. Dengan ini, Feminisme poskolonial hadir sebagai upaya merekonstruksi pusat pemikiran Feminisme dari Barat dan memberikan jawaban atas pengalaman perempuan Dunia Selatan dengan kaitannya terhadap konteks lokal.

## **Pembahasan**

Fenomena Pekerja Seks Perempuan (PSP) di negara poskolonial, terutama Indonesia tidak dapat dipahami sebagai hasil dari dorongan ekonomi semata. Pengalaman para PSP perlu dipandang sebagai fenomena kompleks yang merupakan kombinasi dari lemahnya struktur sosial, politik, dan budaya dalam melindungi perempuan. Ketika Feminisme arus utama memandang PSP di negara poskolonial sebagai korban pasif, hal ini menggambarkan dominasi pemikiran global yang merepresentasikan ketimpangan historis pengalaman perempuan Dunia Selatan (Irfanullah, 2015). Dalam konteks Indonesia, narasi tersebut kerap diulang dalam diskursus media dan kebijakan publik, yang cenderung melihat prostitusi



hanya sebagai bentuk eksploitasi yang harus dihapuskan tanpa mempertimbangkan kompleksitas situasi sosial yang melatarbelakanginya. Padahal nyatanya, faktor yang melatarbelakangi komoditisasi tubuh seorang PSP memiliki kompleksitas tersendiri yang perlu dipahami dengan konteks lokal yang lebih interseksional melalui Feminisme poskolonial. Teori ini menempatkan kolonialisme, kapitalisme global, dan patriarki sebagai sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dan memberikan dampak yang begitu besar terhadap kehidupan perempuan di negara poskolonial, salah satunya Indonesia.

Kolonialisme tidak hanya meninggalkan warisan ekonomi dan politik, tetapi juga membentuk struktur pengetahuan yang memproduksi cara pandang tertentu terhadap tubuh dan seksualitas perempuan di negara poskolonial. Dalam konteks ini, prostitusi tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang marginalisasi perempuan Dunia Selatan yang diposisikan sebagai objek eksotis, tenaga kerja murah, dan komoditas ekonomi (Lee, 2024). Sehingga, melalui pandangan interseksional Feminisme poskolonial, bertahannya para PSP dalam lingkup kerjanya selama lebih dari satu dekade memperlihatkan bahwa keputusan mereka tidak semata-mata sebagai korban budaya patriarki atau kapitalisme. Bentuk kerja ini membutuhkan analisis yang lebih komprehensif mengingat keputusan mereka tidak digerakkan oleh satu atau dua faktor saja, tetapi dilatarbelakangi oleh lapisan keputusan yang kompleks. Sebagai seorang subjek, PSP menegosiasikan hak atas tubuhnya di tengah sistem politik, ekonomi, dan budaya yang memarginalkan mereka. Proses negosiasi yang panjang dalam mempertimbangkan latar belakang para PSP untuk bertahan dalam pekerjaannya menghadirkan perspektif baru bagi masyarakat dalam membaca seksualitas perempuan. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana keterbatasan struktural, tekanan ekonomi, dan batasan sosial tidak sepenuhnya menghapus agensi perempuan, melainkan membentuk cara pandang baru bagi PSP dalam memaknai tubuh, seksualitas, dan strategi bertahan hidup mereka.

### ***Keterbatasan Struktural pada Kehidupan PSP***

Keterlibatan para PSP yang telah terjun lama dalam pekerjaannya memiliki awal yang didasari oleh beberapa faktor struktural. Faktor struktural yang marak terjadi di dunia prostitusi adalah jebakan atau mobilitas paksa yang dapat dikategorikan sebagai kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) (Farhana & Mannan, 2024). Dengan berbagai janji manis yang diberikan oleh para “calo”, para perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia ini kerap tergiur dan memutuskan untuk mengambil pekerjaan tersebut.



*Saya ada bos, disuruhlah ke sini dikasih alamatnya, ternyata, gak tahunya kok saya dipekerjakan di [...], dari situ saya kaget. Udah gitu, maaf, saya kayak dibilang dijual mungkin iya ya kasarnya. Ditanya kerja apa, nggak dijelasin soalnya kan yang setahu saya kirain waitress kafe. Waktu itu saya umur 23 tahun. Kok tempatnya gini, kok rumah ya? Kafanya mana? (Wawancara, 22 Oktober 2025).*

Melalui janji manis yang diberikan, narasumber Naila (nama samaran) tetap melanjutkan pekerjaan yang diberikan dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkan di kemudian hari. Rekrutmen manipulatif seperti yang dialami oleh narasumber menunjukkan bahwa perempuan yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi dan sosial lebih mudah menjadi sasaran eksploitasi (Andrade-Rubio et al., 2024). Kerentanan tersebut ditandai oleh keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, ketergantungan ekonomi pada pihak lain, serta posisi subordinat perempuan dalam struktur sosial yang patriarkis. Kondisi ini tidak berhenti pada saat perekrutan awal saja, tetapi kondisi ini menjadi suatu jebakan untuk menahan para PSP tetap bekerja melalui ketergantungan ekonomi dan dominasi berbasis kuasa. Kondisi struktural yang mengakibatkan para PSP bertahan dengan pekerjaannya adalah hegemoni kultural pria pada tingkat rumah tangga atas kaum perempuan yang diekspresikan melalui sistem yang patriarkis (Chairunyssa & Ula, 2024). Sistem ini kemudian memberikan celah bagi kedua narasumber yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk kemudian mencari pelarian.

*Awalnya saya juga nikah. Cuma karena saya gak dicerai, berangkatlah saya ke Jepang. Kan saya kenyang pukul tuh di KDRT, saya kan gak ngerti ya, saya harus kemana ... Kan saya babak belur nih muka (Wawancara, 22 Oktober 2025).*

Situasi ini menunjukkan bahwa masuk dan bertahanya seorang perempuan menjadi PSP merupakan hasil dari keterpaksaan struktural serta konsekuensi dari sistem yang menciptakan keterikatan dan ketergantungan ekonomi dan sosial. Hal ini juga lahir dari kolonialisme yang menghasilkan hirarki sosial yang mendiferensiasikan kehidupan masyarakat di Dunia Selatan yang sering menjadi objek kapital (Strazzeri, 2024). Kondisi ini menciptakan sistem yang menempatkan perempuan Dunia Selatan dalam keterikatan dan ketergantungan ekonomi dan sosial membuat mereka terus bertahan dalam posisi tersebut. Kolonialisme tidak hanya menciptakan eksploitasi ekonomi di dalam masyarakat Dunia Selatan, tetapi juga membentuk struktur yang rentan bagi para perempuan, khususnya para perempuan pekerja seks.

### ***Batas Sosial Masyarakat bagi PSP***

Pada dasarnya, melalui analisis gender, perilaku seksual yang diekspresikan masing-masing individu akan dipengaruhi oleh konstruksi nilai dan budaya yang dianut. Sehingga, ideologi dominan yang hadir di masyarakat akan menentukan pandangan bagi seksualitas perempuan. Masyarakat Indonesia yang cenderung patriarki akan menempatkan tubuh perempuan sebagai suatu objek yang penuh aturan-aturan di dalamnya dalam menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kategorisasi ini adalah bentuk dari sistem patriarki yang mengkategorikan seks sebagai kepemilikan laki-laki, sehingga perempuan perlu menjaga dan membendung hasrat seksualnya (Hooker, 2021). Ketika seorang perempuan menjadi korban eksploitasi seksual, stigma yang diberikan terhadapnya menjadi non-normatif yang selanjutnya memberikan label tertentu baginya, seperti perempuan “nakal”, *pelacur*, dan *lonte*. Sehingga, istilah PSP, atau lebih umum disebut sebagai PSK, menjadi bentuk diskriminasi masyarakat terhadap para pekerja seks karena konstruksi seksual normatif yang menciptakan kubu oposisi biner antara “perempuan baik-baik dan perempuan jalang”. Seorang PSP disamakan dengan kategori “perempuan tidak baik” karena mereka mengekspresikan seksualitasnya hanya untuk uang dan tidak mengikuti norma bahwa seksualitas perempuan dibangun untuk memenuhi kebutuhan seksual laki-laki yang dibatasi hanya untuk suaminya. Dengan kata lain, norma sosial yang patriarkis ini membentuk stigma yang memaksakan mereka bertahan pada posisi yang secara sosial telah dianggap “rusak” dan tidak dapat kembali ke kehidupan normatif.

*Enak kamu tiap hari kerja, ditidurin, dapet duit. Itu perkataan bikin sakit hati, iya tapi kan itu udah resikonya. Orang-orang berkata kan gini, kalian tuh sampahnya masyarakat. Kok bisa dibilang kayak gini? (Wawancara, 22 Oktober 2025).*

Pelabelan yang diberikan terhadap para PSP berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang digunakan untuk mendisiplinkan tubuh dan perilaku perempuan. Dengan pelabelan moral ini, masyarakat akan memiliki batas yang jelas antara perempuan yang dianggap moral dan tidak bermoral. Hal ini sejalan dengan pemikiran Neville-Sheppard yang menjelaskan bahwa mekanisme kontrol sosial ini digunakan untuk mempertahankan citra perempuan yang ideal versi masyarakat umum (Neville-Sheppard, 2019).

Stigma negatif yang menyebabkan keterasingan sosial bagi para PSP tidak hanya datang dari masyarakat luar saja. Namun, dukungan terdekat dari keluarga yang menjadi tombak paling penting juga kerap hilang. Pihak keluarga sering menjadi wadah pertama yang memproduksi stigma negatif yang bersumber dari budaya patriarki ini. Alih-alih memberikan ruang penyembuhan dan pemulihan, keluarga para PSP sering menutup diri dan justru

memberikan penolakan terhadap kondisi nyata yang terjadi pada anggota keluarganya.

*Intinya kenapa saya masih tetep bertahan seperti ini, karena saya pulang tidak punya rumah. Nggak ada tujuan pulang kalau saya. Buat apa saya pulang? Udah benci semua itu* (Wawancara, 22 Oktober 2025).

Ketidakmampuan pihak keluarga untuk memberikan ruang penerimaan bagi PSP menunjukkan gambaran jelas dari keluarga yang kerap menempatkan mereka untuk tetap berada di kondisi rentan. Keterasingan sosial ini yang menjadi salah satu penjelasan mengapa prostitusi dipandang sebagai ruang yang relatif “aman” dibandingkan kehidupan sosial mereka (Hooker, 2021).

### ***Tekanan Ekonomi yang Berkelanjutan***

Dalam sistem ekonomi dunia yang kapitalistik, depresi ekonomi kian memuncak di tengah kondisi sosial yang tidak stabil yang menyebabkan lapangan pekerjaan yang jauh lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan laporan Survei Konsumen Bank Indonesia mengenai Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK), pada Agustus 2025, nilai IKLK tercatat sebesar 93,2, yang menandakan kondisi pasar kerja yang cenderung pesimis. Dengan lapangan pekerjaan yang semakin sempit, faktor keterbatasan ekonomi menjadi titik pembahasan yang diutamakan ketika seorang perempuan memutuskan untuk menjadi PSP. Kondisi ini diperburuk dengan situasi ekonomi yang sering tidak stabil dan menempatkan perempuan dalam kondisi yang rentan. Realitas ini tergambar dari pengalaman para narasumber yang menegaskan bahwa prostitusi dipilih karena ketidakmungkinan untuk mencari sumber penghasilan lain yang stabil dan dapat menerima mereka. Hambatan usia, pendidikan, pengalaman, serta kompetisi yang sangat tinggi di dunia pekerjaan di Indonesia membuat mereka memandang bahwa menjadi seorang PSP adalah pekerjaan yang paling bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

*Siapa yang ingin kerja ini, memang nggak ada, dari faktor ekonomi itu tadi juga iya. Sekarang kita kalau nggak kenal orang dalam, kerja benar, kita nggak ada ijazah, nggak bisa. Memang susah, Kak* (Wawancara, 22 Oktober 2025).

Kondisi ini menggambarkan bahwa keputusan perempuan untuk menjadi PSP sering kali menjadi strategi untuk bertahan hidup di tengah struktur ekonomi yang meminggirkan mereka. Fenomena ini dikarakterisasi sebagai *feminization of survival* yang menggambarkan strategi perempuan dari negara Dunia Selatan yang terdorong untuk bekerja di sektor informal yang berbahaya dan rentan untuk bertahan hidup di tengah struktur sosial-ekonomi yang tidak adil (Fernández & Ward, 2018). Hal ini memperkuat analisis bahwa kapitalisme

global tidak hanya mengeksploitasi tenaga kerja di negara poskolonial, tetapi juga mengkodifikasikan tubuh perempuan sebagai suatu sumber nilai ekonomi. Ketika akses terhadap pekerjaan formal semakin terbatas, tubuh perempuan menjadi salah satu sumber daya kapital yang sering dieksploitasi sebagai komoditas (Magnani & Marchini, 2022).

Pemaknaan ekonomi terhadap bentuk kerja para PSP tidak dapat dipahami sebagai pengalaman eksploitasi saja. Namun, bagi sebagian PSP, pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaannya memberikan rasa kontrol dan kestabilan yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan informal lainnya.

*Enaknya tuh ya istilahnya uang ya. Kita mau apa aja kita bisa. Mau bergaya apa aja bisa dong. Kayak mau makan enak mau apa, beli apa kita mau, mau makan yang enak (Wawancara, 22 Oktober 2025).*

Melalui analisis tersebut, dapat dipandang bahwa keputusan ekonomi para PSP perlu dibaca sebagai bentuk adaptasi rasional terhadap struktur pasar kerja yang secara sistematis yang mengecualikan perempuan kelas bawah (Fernández & Ward, 2018). Kondisi tersebut menciptakan dunia prostitusi yang menjadi ruang yang memiliki keuntungan praktis dan jalan keluar dalam bertahan hidup bagi perempuan dalam kondisi yang serba terhimpit.

### ***Agensi Perempuan sebagai Strategi Bertahan***

Bertahannya seorang PSP dalam pekerjaannya tidak dapat dipahami secara simplistik sebagai kondisi tanpa pilihan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa para narasumber memiliki agensi dalam mengambil keputusan, meskipun keputusan tersebut lahir dalam situasi yang terbatas. Dalam kerangka Feminisme poskolonial, perempuan di negara-negara poskolonial tidak dapat direduksi sebagai korban pasif dari sistem yang patriarkis dan memiskinkan mereka, tetapi pengalaman mereka perlu dipandang sebagai pengalaman nyata sebagai strategi bertahan hidup melalui negosiasi dengan struktur sosial yang menindas (Hendrastiti & Setiahati, 2022). Keputusan untuk tetap bertahan sebagai PSP meski sudah bertahun-tahun dan memiliki “opsi” untuk keluar mencari pekerjaan lain dipandang sebagai bentuk *constrained agency*, yakni agensi yang dipilih dalam ruang yang terbatas tetapi tetap merefleksikan pilihan yang dibuat dengan kesadaran. Hal ini terlihat dari narasi para narasumber yang menyampaikan bahwa meskipun kondisi awal mereka memperlihatkan paksaan struktural, bertahannya mereka sebagai seorang PSP merupakan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan rasional demi keberlangsungan hidup, stabilitas ekonomi, dan kontrol atas tubuhnya. Agensi yang dimiliki oleh para PSP juga dapat dimaknai sebagai

bentuk pelepasan diri dari sistem yang kerap memiskinkan mereka. Dalam sistem yang patriarki, sumber penghasilan utama selalu dititikberatkan pada laki-laki (Hafani & Buldani, 2025). Sehingga, dengan menjadi seorang PSP yang berpenghasilan stabil, mereka berkeinginan untuk membebaskan diri dari ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki dan keluarga.

*Gak apa-apa sengsara. Yang penting besok anak kita jangan [ngerasain] susahnya orang tua nyari uang ... Besok nyari tempat tinggal sendiri. Entah makan sama garam, nggak apa-apa. Yang penting pisah dari [suami]* (Wawancara, 22 Oktober 2025).

Faktor agensi memperlihatkan bahwa pilihan perempuan untuk menjadi seorang PSP bukan semata-mata ruang penindasan dan paksaan terhadap perempuan, tetapi juga bisa menjadi ruang negosiasi identitas dan kontrol diri bagi perempuan yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan sosial (Grittner, 2023). Negosiasi ini tercermin dalam upaya PSP untuk merebut kembali otoritas tubuhnya, menentukan batas layanan seksual, dan mengelola penghasilannya secara mandiri di tengah berbagai keterbatasan. Agensi yang hadir dalam kehidupan para PSP ini disampaikan Hartoyo, anggota KAPAL Perempuan, dalam wawancara mendalam (17 Desember 2025) sebagai ruang negosiasi perempuan dalam menggugat tubuhnya yang sering kali dipaksa melayani keinginan maskulin. Menurut Hartoyo, ruang prostitusi justru menjadi ruang yang paling memungkinkan bagi perempuan untuk memiliki hak dan kontrol terhadap tubuh dan seksualitasnya dibandingkan ruang keluarga dan komunitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka Feminisme poskolonial, pengakuan terhadap agensi ini penting untuk memahami perempuan, khususnya perempuan pekerja seks sebagai seorang subjek yang memiliki otoritas tinggi terhadap dirinya sendiri.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan seorang perempuan untuk bertahan menjadi Pekerja Seks Perempuan (PSP) di kawasan Danau Tempe tidak hanya dilatarbelakangi oleh satu faktor saja, tetapi merupakan pengalaman kompleks yang didasari oleh berbagai faktor. Fenomena para PSP di yang sering kali direduksi sebagai akibat dari dorongan ekonomi ataupun bentuk penindasan patriarki yang kerap direpresentasikan oleh arus Feminis utama dari Barat. Melalui pendekatan Feminisme poskolonial, penelitian ini mengungkapkan bahwa pengalaman PSP dibentuk oleh relasi kuasa yang kompleks antara warisan kolonialisme, kapitalisme global, serta norma sosial dan budaya lokal yang patriarkis.

Dalam konteks tersebut, tubuh dan seksualitas perempuan tidak hanya menjadi objek kontrol sosial, tetapi juga menjadi ruang yang secara terus menerus dinegosiasikan dalam upaya mempertahankan keberlangsungan hidup mereka.

Keterbatasan struktural pada kehidupan PSP, batasan sosial yang diberikan masyarakat kepada para PSP, tekanan ekonomi, serta agensi para perempuan sebagai strategi bertahan hidup di tengah kehimpitan memperlihatkan keberlanjutan para PSP dalam pekerjaan seks sebagai isu yang kompleks. Keterlibatan para PSP dalam dunia prostitusi banyak diawali oleh paksaan struktural melalui praktik manipulatif, kekerasan berbasis gender, dan ketidakadilan ekonomi yang kerap memposisikan kaum perempuan dalam kondisi marjinal yang sulit untuk dilepaskan. Selain itu, stigma sosial yang dilabelkan terhadap para PSP ini kian memperkuat posisi mereka sebagai kelompok yang tersubordinasi dan secara tidak langsung membuat mereka sulit untuk kembali ke kehidupan normatif. Namun, penelitian ini juga memperlihatkan dimensi agensi para PSP yang memaknai pekerjaannya sebagai strategi bertahan hidup, upaya memperoleh otonomi ekonomi, serta bentuk resistensi dari struktur patriarki yang mengekang seksualitas perempuan terutama dalam budaya Timur.

Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa dalam memahami dunia prostitusi dan pengalaman perempuan pekerja seks di negara poskolonial memerlukan pendekatan yang lebih interseksional. Penelitian ini berusaha untuk menantang narasi Feminisme arus utama yang cenderung memposisikan perempuan pekerja seks di negara poskolonial sebagai korban pasif tanpa agensi. Hasil dari temuan ini justru memperlihatkan bahwa agensi dan kerentanan para perempuan pekerja seks bukan menjadi dua hal yang terpisah, melainkan dua entitas yang saling mempengaruhi. Pendekatan ini memungkinkan hadirnya perspektif yang lebih sensitif terhadap konteks sosial, budaya, dan pengalaman historis yang tidak dapat diuniversalkan. Pendekatan Feminisme poskolonial memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap pengalaman para PSP dengan tidak mengabaikan realitas dari penindasan struktural yang mereka hadapi. Melalui analisis tersebut, penelitian ini telah berkontribusi dalam memperkaya diskursus Feminisme dengan menghadirkan suara perempuan Dunia Selatan yang kerap disederhanakan dalam narasi Feminisme arus utama.

Setelah mempertimbangkan temuan tersebut, diperlukan adanya pendekatan kebijakan sosial yang lebih humanis terhadap kelompok perempuan rentan seperti PSP yang didasari oleh pemahaman kontekstual. Pemerintah dan lembaga-lembaga sosial perlu memberikan

akses yang lebih merata terhadap pemulihan psikososial, dukungan ekonomi, ruang pelatihan keterampilan, serta ruang-ruang yang inklusif yang terbebas dari stigma negatif terhadap perempuan-perempuan yang bekerja di industri seks. Pendekatan yang lebih interseksional dan berkeadilan dapat menghasilkan ruang aman bagi seluruh kelompok rentan, terutama para perempuan pekerja seks di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga perlu perlahan mengedukasi diri dalam cara pandang moralistik terhadap pekerja seks dan mentransformasikan budaya patriarki yang lestari di masyarakat.

Penelitian ini tentu memiliki sejumlah keterbatasan yang dapat menjadi bahasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya guna mengintegrasikan pandangan yang lebih interseksional terhadap PSP. Penelitian ini berfokus pada konteks lokal di kawasan Danau Tempe, Kecamatan Sanur, dengan jumlah partisipan yang terbatas, sehingga temuan yang dihasilkan belum dapat merepresentasikan ke seluruh konteks perempuan pekerja seks di Indonesia ataupun di negara Dunia Selatan. Selain itu, penelitian ini belum secara mendalam mengeksplorasi dimensi lain dari PSP, seperti peran negara, aparat hukum, jaringan industri seks, serta dimensi perbedaan identitas individu dari PSP itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas bahasan dengan melibatkan cakupan geografis yang lebih luas, partisipan yang lebih beragam, serta pendekatan yang lebih interseksional. Dengan demikian, penelitian ke depan diharapkan semakin memperkaya pemahaman mengenai kompleksitas pengalaman PSP di Indonesia.

---

## Daftar Pustaka

- Allen, L. (2015). The Power of Things! A ‘New’ Ontology of Sexuality at School. *Sexualities*, 18(8), 941–958. <https://doi.org/10.1177/1363460714550920>
- Andrade-Rubio, K. L., Moral-de-la-Rubia, J., & Izcara-Palacios, S. P. (2024). Vulnerability to Sex Trafficking: Adult Women’s Experiences While They Were Adolescents. *Societies*, 14(4), 51.
- Anonim. (2025). Wawancara mendalam PSP.
- Bank Indonesia. (2025). *Survei Konsumen Agustus 2025*.



- Capaldi, M. P. (2020). The Dichotomy of Religion and Sexualities within ASEAN Member States. *Journal of Human Rights and Peace Studies*, 6(2), 311-340.
- Chariunyssa, G., & Ula, D. M. (2024). Dampak Budaya Patriarki terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 66-82.
- Dolinšek, S., & Hearne, S. (2022). Introduction: Prostitution in Twentieth Century Europe. *European Review of History: Revue Européenne d'histoire*, 29(2), 121-144.  
<https://doi.org/10.1080/13507486.2022.2029361>
- Farhana, K. M., & Mannan, K. A. (2024). The Socioeconomic Factors of Female Child Trafficking and Prostitution: An Empirical Study in the Capital City of Bangladesh. *Social Sciences*, 13(8), 395.
- Fernández, M., & Ward, J. (2018). Explaining the Feminization of Survival: Global Sex Work, Migration and Resilience. *Global Studies Journal*, 5(1), 112-130.
- Furidha, B. W. (2023). Comprehension of the Descriptive Qualitative Research Method: A Critical Assessment of the Literature. *Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(4). <https://doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443>
- Grittner, A. L. (2023). "Carefully Curated/For Heart and Soul": Sensing Place Identity in Sex Workplaces. *Sexes*, 4(4), 473-492.
- Hafani, M. H., & Buldani, M. N. (2025). Patriarki dan Kekuasaan: Bagaimana Laki-Laki Mengendalikan Kehidupan dalam Keluarga. *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 1-12.
- Hendrastiti, T. K., & Setiahad, R. (2022). The Agency of Women in the Climate Crisis: A Decolonizing Feminist Method. *Jurnal Perempuan*, 27(3), 185-194.
- Hooker, J. (2021). Patriarchy and Sexual Norms in Southeast Asia. *Humanities*, 10(12), 187.  
<https://www.mdpi.com/2075-471X/10/12/187>
- Irfanullah, G. (2015). Orientalisme Romantis: Imajinasi Tentang Timur Sebelum Edward Said. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 11(2), 157-165. <https://doi.org/10.21009/JSQ.011.2.05>
- Kapur, R. (2001). Post-Colonial Economies of Desire: Legal Representations of the Sexual Subaltern. *Denver Law Review*, 78(4), 855-885. Retrieved from  
<https://digitalcommons.du.edu/dlr/vol78/iss4/16/>

- Latuconsina, S. (2025). Honor killing dan kontrol patriarki terhadap seksualitas perempuan Arab. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 1(3), 370-380.  
<https://doi.org/10.63822/fj6e7352>
- Lee, S. (2024). The Specific Visuality of Women of the Global South in the Media of the Global North. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, 136.  
<https://doi.org/10.1057/s41599-023-02578-x>
- Lim, W. M. (2025). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33(2), 199-229.  
<https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Magnani, L., & Marchini, A. M. (2022). Creating New “Enclosures”: Violently Mimicking the Primitive Accumulation through Degradation of Women, Lockdowns, Looting Finance, War, Plunder. *Philosophies*, 7(3), 58.  
<https://doi.org/10.3390/philosophies703005>
- Neville-Shepard, M. (2019). Disciplining the Female Student Body: Consequential Transference in Arguments for School Dress Codes. *Women’s Studies in Communication*, 42(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/07491409.2019.1573771>
- Park, A. (2022). Fetishization of Asian women in US culture and media. *FINEST*, 10.
- Pujhana, I. K. W., & Tobing, D. H. (2021). Perjalanan Wanita Pekerja Seks Komersial (PSK): Sebuah Kebebasan, Pembuktian Diri dan Cinta. *Widya Cakra: Journal of Psychology and Humanities*, 1(3), 24-35. <https://doi.org/10.24833/widyacakra.2021.v1.i3.p72954>
- Rasyid, E. (2018). Dinamika Komunikasi Organisasi Masyarakat Marjinal (Studi Pada Komunitas Perempuan Pekerja Seks Yogyakarta). *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 8-22.  
<https://doi.org/10.21107/ilkom.v12i1.3711>
- Richardson, D. (2017). Rethinking Sexual Citizenship. *Sociology*, 51(2), 209-224.
- Riwanto, R. (2018). Komoditisasi Tubuh Perempuan Pekerja Seks Komersial di Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan (Sebuah Studi Kasus). *Social Studies*, 6(1), 24-33.  
Retrieved from  
<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/socialstudies/article/view/557/439/997>
- Strazzeri, I. (2024). Gender and Postcolonial Studies: History of the Concept and Debate.

*Frontiers in Sociology*, 9, 1414033.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sultana, H. (2015). Sex Worker Activism, Feminist Discourse and HIV in Bangladesh.  
*Culture, Health & Sexuality*, 17(6), 777–788.

<https://doi.org/10.1080/13691058.2014.990516>

Suryawati, I., Seran, A., & Sigit, R. R. (2021). Perempuan Subaltern Dunia Ketiga dalam Tinjauan Teori Feminisme Poskolonial Gayatri Chakravorty Spivak. *FOCUS: Journal of Social Studies*, 2(2), 89–95. <https://doi.org/10.37010/fcs.v2i2.336>

Suryandaru, Y. S. (2001). Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan dalam Perdagangan Perempuan (*Trafficking*) untuk Prostitusi. *Manusia, Kebudayaan, dan Politik*, 14(2), 35-50. Retrieved from <https://journal.unair.ac.id/filerPDF/04-yayang.pdf>